



Target Dua Raperda Rampung Mei

■ DPRD Tak Mau Asal-asalan

PONTIANAK, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak melaksanakan Rapat Paripurna Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap 2 Rancangan Perda Berasal Dari Kepala Daerah Kota Pontianak tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak.

Kemudian tanggapan/Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak Terhadap Pendapat Kepala Daerah Kota Pontianak atas 2 Rancangan Perda berasal dari DPRD Kota Pontianak tentang Smart City dan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu (6/4).

Pada kesempatan itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut



TRIBUN/OKI

JAWABAN - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pontianak kepada Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, Rabu (6/4).

Target Dua Raperda Rampung Mei

Sambungan Hal.9

baik pendapat dan saran dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Pontianak terkait dengan pandangan mereka terhadap dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan belum lama ini.

Wako Edi mengatakan, upaya pembentukan kedua Raperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ini diharapkan mampu meningkatkan pelaya-

nyan kepada masyarakat.

"Terutama tentang PBG, ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Di dalamnya terdapat percepatan perizinan," ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Edi, pembahasan lebih lanjut untuk menyusun, membuat dan menerapkan Raperda tersebut akan menunggu pembahasan teknis di DPRD

Kota Pontianak. Kemudian sebelum disahkan, akan dilaksanakan uji publik.

"Tahun ini bisa selesai. Biasanya ada uji publik terlebih dahulu, kemudian akan naik untuk persetujuan Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Sataruddin mengungkapkan, bahwa pihaknya menargetkan Raperda yang diusulkan akan rampung menjadi Perda pada Mei

2022 mendatang.

"Untuk mengesahkan Raperda yang diusulkan ini memerlukan waktu panjang, perlu kajian yang matang dan perlu diskusi yang panjang dengan para pemangku kepentingan, karena kita tidak ingin perda ini jadi asal-asalan dan tidak memiliki bobot. Yang pasti kita upayakan untuk disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan," terangnya. **(oki)**